

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS MASJID UNTUK MENANGKAL RADIKALISME ISLAM DI BANTEN

Muhammad Syafar

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

m.syafar@uinbanten.ac.id

Abstract

This paper aims to explore the paradigm of community development within Islamic community and its contribution to prevent radicalism in Indonesia, especially in Banten. Potentially, community empowerment based mosque in Banten could be accordance with social culture of Banten Islamic community, which is implemented by 3 (three) approach of social welfare: social philanthropy, social administration and social work. In this paper, community empowerment oriented not only to improve Islamic values but also improving social economy of jama'ah which is participated through strengthening DKM institution, social capital community, entrepreneurship and social defense to prevent radicalism in the framework of Islamic comprehension and its impact on local community.

Keywords: Community development paradigm, social welfare, community.

A. Pendahuluan

Penanganan gerakan radikalisme Islam yang berdampak pada aksi gelombang terorisme di Indonesia tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Radikalisme Islam yang saat ini hadir di tengah-tengah masyarakat merupakan embrio lahirnya aksi-aksi terorisme yang mewarnai kondisi *psychosocial* masyarakat yang dampaknya pada rasa takut, cemas dan kekhawatiran yang mencekam. Radikalisme yang berkembang saat ini sebagai suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner terhadap nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (violence) dan aksi-aksi yang ekstrem. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT, 2016: 1) menyebut ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal, yaitu: 1) *in-tolerant* (tidak mau menghargai pendapat

&keyakinan orang lain), 2) *fanatic* (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah), 3) *exclusive* (membedakan diri dari umat Islam umumnya) dan 4) *revolutionary* (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan). Untuk itu, dalam menangkal paham radikal di masyarakat membutuhkan sinergi antar segenap elemen, baik pemerintah, akademisi, agamawan, tokoh masyarakat, maupun masyarakat. Kesemuanya harus memposisikan terorisme sebagai *common enemy* yang menjadi salah satu dari *extraordinary crime* yang seolah tiada henti.

Radikalisme dapat dimaknai sebagai pandangan atau ideologi yang ditandai dengan meningkatnya komitmen pada kekerasan atau komitmen membolehkan cara dan strategi kekerasan dalam berbagai konflik. Sikap dan pemahaman Islam yang radikal dapat memotivasi penganutnya melakukan berbagai cara yang seringkali menjadikannya memilih untuk bergabung dalam aksi terorisme. Dalam konteks Indonesia, Abdurrahman Mas'ud berpendapat bahwa gerakan radikalisme agama dalam beberapa hal dapat mengganggu stabilitas nasional dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)¹. Hal ini terlihat dari berbagai aksi gelombang terorisme di Indonesia, dimanasejak awal tahun 2000, pelaku terorisme menyerang fasilitas umum sebagai target terornya, yang dampaknya mengakibatkan banyaknya korban, baik yang tewas maupun terluka. Sasaran serangan gerakan terorisme saat ini perlahan mengalami pergeseran dengan menambah target sasaran, yaitu: fasilitas pemerintahan dan aparat kepolisian. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2013-2017), polisi menjadi target serangan teroris². Aksi teror

¹ Setidaknya ada 3 (tiga) alasan mengapa radikalisme agama ini dapat mengganggu NKRI, yaitu: 1) mewarnai atau mengganti ideologi negara yang mapan dengan ideologi kelompok tersebut, tanpa mempertimbangkan kepentingan ideologi kelompok lain. 2) membawa instabilitas/kersesahan sosial karena sifatnya yang cenderung militan, keras, cenderung anarkis, tidak mau kompromi. 3) dampak dari radikalisme dapat mengancam eksistensi kedudukan para elit penguasa. Lihat Kementerian Agama: Radikalisme Agama Tantangan Kebangsaan (2014:1)

² Data penyerangan terhadap polisi di tahun 2017 telah terjadi beberapa kali di sejumlah daerah di Indonesia, yaitu: 14 Januari 2015 di Jalan Thamrin-Jakarta, 5 Juli 2016 di Markas Polres Surakarta, 20 Oktober 2016 di Cikokol-Tangerang, 11 April 2017 di Purbalingga, Jawa Tengah, 24 Mei 2017 di

tersebut yang dilakukan kelompok jaringan terorisme itu telah memakan banyak korban, baik aparat polisi maupun warga sipil.

Berbagai aksi teror dan sikap *intolerant* tersebut di atas seolah tiada henti di Indonesia. Hasil riset di 32 provinsi oleh BNPT-The Nusa Institute (2011) menunjukkan bahwa pemahaman keagamaan masyarakat secara keseluruhan berada pada tingkat waspada terhadap radikalisme³. Perkembangan radikalisme di beberapa daerah ada yang masuk kategori “zona merah” yang menunjukkan daerah tersebut terindikasi penyebaran radikalisme dan kerawanan aksi terorisme, salah satunya: Banten. Masyarakat Banten secara sosial budaya memiliki nilai religius yang kuat dan masih bertahan hingga saat ini, namun masih terindikasi rawan oleh penyebaran radikalisme ajaran Islam.

Selanjutnya, laporan hasil survey BNPT-FKPT Provinsi Banten (2017) mencatat bahwa potensi radikalisme masyarakat di Provinsi Banten berada pada kategori Potensi Sedang menuju Kuat⁴. Data menunjukkan bahwa skor total variabel Pertahanan dan Keamanan (X3= 67) dan Kearifan Lokal (X6= 70,5) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Potensi Radikalisme (Y), artinya X3 & X6 memiliki daya tangkal optimal untuk membendung perkembangan

Kampung Melayu-Jakarta, 25 Juni 2017 di Medan. Lihat Tempo: *Ini Berbagai Serangan Teroris pada Polisi*, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/887298/ini-berbagai-serangan-teroris-pada-polisi>, pada tanggal 9 September 2017.

- ³ Pemahaman keagamaan masyarakat secara keseluruhan berada pada tingkat “waspada terhadap radikalisme” yaitu sebesar 66,3 persen dan radikalisme menjangkau semua level masyarakat, yaitu: pengurus masjid, tokoh agama, majelis taklim, dosen, guru, mahasiswa, murid sekolah, dan lain-lain. Hal lain yang menarik perhatian adalah bahwa pengetahuan mereka tentang radikalisme justru mayoritas didapat dari internet yaitu 90% dibanding dari buku, diskusi, dan ceramah. Sementara pengurus masjid dan guru sekolah madrasah merupakan kelompok yang memiliki tingkat bahaya paling tinggi, masing-masing 15,4 persen. Lihat:
- ⁴ Potensi Radikal ini diperoleh melalui penelitian kuantitatif dengan metode survei. Dengan tujuan untuk menggambarkan tingkat potensi radikalisme masyarakat di provinsi Banten sekaligus memetakan variabel-variabel apa saja yang mampu menangkali tingkat radikalisme. Dari rentang nilai 1-100, Potensi Radikalisme masyarakat di Provinsi Banten tahun 2017 menunjukkan angka yang perlu diwaspadai yaitu 53,5. Potensi Radikal tertinggi dicerminkan oleh faktor dominan dari Potensi Sikap Radikal pada angka 45,5 (Potensi Sedang) dan Potensi Pemahaman Radikal yang berada pada angka 64,90 (Potensi Kuat).

potensi radikalisme di Banten. Secara realitas, masyarakat pedesaan dan perkotaan Banten umumnya masih memegang teguh paham keagamaan sesuai konteks kearifan lokal yang ditanamkan dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat oleh para ulama. Secara historis, penyebaran ajaran Islam di Banten dilakukan melalui masjid sebagai sarana dakwah bagi para ulama mengajarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat di wilayah pedesaan dan perkotaan.

Masjid secara sosial memiliki makna penting bagi masyarakat Islam di Banten, aktivitas keagamaan berjalan untuk melaksanakan ajaran Islam, utamanya sholat *fardhu* berjama'ah. Selain itu, para ulama juga memanfaatkan masjid untuk berdakwah dalam bentuk pengajian rutin yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesalihan umat Islam di wilayahnya masing-masing. Kementerian Agama RI (2008: 67) menjelaskan bahwa pemanfaatan masjid pada umumnya digunakan sebagai sarana melaksanakan ibadah (sholat dan pengajian) serta sebagai sarana kegiatan sosial berupa tempat musyawarah dan pendidikan. Atas dasar itu, peran masjid di Banten memiliki makna strategis baik dalam tataran substansi maupun aksi oleh para ulama dalam mewujudkan ajaran Islam sebagai agama *rahmatan lil 'ālamīn* yang bertumpu pada nilai kearifan lokal masyarakat Banten. Sebagaimana Nabi Muhammad saw. telah berhasil mengubah dan membangun sebuah masyarakat Muslim melalui gerakan dakwah dan pemberdayaan umat dari masjid Nabawi di Madinah.

Atas dasar itu, peran masjid secara sosial dapat memberikan kontribusi positif dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan dan menghindari paham radikal bagi umat Islam⁵. Peran masjid cukup mampu menjadi lembaga sosial yang berperan menangkal radikalisme agama di Banten melalui penguatan sosial ekonomi masyarakat Muslim. Sebab faktor pemicu radikalisme Islam di Indonesia

⁵ Kepala Badan Intelijen Negera (BIN) mengatakan "Kami sangat mohon dukungan untuk langkah langkah bersama dalam rangka menguatkan peran dan fungsi masjid masjid.... Kami harap masjid jadi tempat untuk meredam gerakan-gerakan radikalisme, gerakan-gerakan intoleransi...." Lihat: Kompas.com: BIN Ingin Masjid Jadi Pusat Peredam Radikalisme dan Intoleransi. diakses tanggal 29 November 2018.

salah satunya menurut Nurjannah (2013: 184) kemunculannya dipicu oleh ketimpangan ekonomi dan sosial. Begitu juga Natalia (2016: 19) bahwa sesungguhnya masalah-masalah yang menyangkut hubungan antar umat beragama di Indonesia bukan problem yang terjadi dengan sendirinya tetapi erat juga kaitannya dengan kondisi politik, sosial dan ekonomi. Hal tersebut juga diperjelas oleh Mufid (2013) bahwa *personal problem* (berkaitan dengan faktor ekonomi) sebagai salah satu variabel penting munculnya radikalisme. Dengan demikian, kondisi ketimpangan sosial ekonomi yang dialami oleh sebagian umat Muslim di Banten bisa mendorong pemicu gerakan radikalisme Islam yang berdampak pada stigma negatif bagi umat Islam keseluruhan, khususnya di Banten.

Untuk itu, pemberdayaan masyarakat berbasis masjid menjadi sebuah alternatif dalam menangkal isu radikalisme sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. Menurut Nurjamilah (2017: 115) menjelaskan bahwa Nabi saw. telah berhasil melakukan pemberdayaan masyarakat Arab berbasis Masjid Nabawi di Madinah, dimana terdapat dua alasan atau tujuan penting dari pemberdayaan tersebut, yaitu: a) Membebaskan manusia dari keyakinan dan budaya menyimpang (jahiliyah), dan b) Mempertahankan dan membangun masyarakat muslim. Dengan demikian, dalam konteks masa kini, apakah program pemberdayaan sosial ekonomi berbasis masjid dapat diimplementasikan? Bagaimana pola pemberdayaan tersebut berkontribusi dalam menangkal radikalisme baru di Banten?

Beranjak dari uraian di atas, dalam artikel ini penulis akan mencoba meninjaunya dari segi pendekatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pendekatan filantropi, administrasi dan pekerjaan sosial. Tujuannya agar memperoleh gambaran pola pemberdayaan masyarakat berbasis masjid dalam menangkal radikalisme Islam. Artikel disusun menggunakan pendekatan induktif melalui pemaparan data yang dikumpulkan berdasarkan kajian pustaka dan hasil-hasil penelitian kemudian ditarik kesimpulan umum, dengan menggunakan perspektif kesejahteraan sosial sebagai pendekatan analisis.

B. Pembahasan

Secara umum konsep pemberdayaan merupakan upaya menjawab bentuk konsep pembangunan yang ideal⁶. Pemberdayaan dimaknai sebagai sebuah pendekatan yang lebih mengutamakan komunitas sebagai subyek pembangunan, melalui intervensi sosial dalam upaya untuk memperkuat sumberdaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kapasitasnya agar dapat menentukan sendiri masa depannya. Makna tersebut menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan bertujuan untuk melakukan proses perubahan agar masyarakat memahami manfaat dan peranannya dalam program pembangunan⁷, mampu merumuskan kebutuhan dengan potensi/sumberdaya yang dimiliki, mampu menentukan prioritas masalah yang akan dipecahkan sesuai dengan kebutuhan dan potensinya, serta mampu menyusun rencana kegiatan untuk menangani atau menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

Seiring dengan definisi pemberdayaan masyarakat di atas, berbagai pendekatan banyak dilakukan oleh para pemangku kepentingan yang mengupayakan agar keberdayaan masyarakat terwujud dalam memanfaatkan potensi sosial ekonomi

⁶ Konsep pemberdayaan merupakan upaya mencari bentuk konsep pembangunan yang ideal setelah berbagai paradigma pembangunan sebelumnya gagal memenuhi harapan sebagian besar umat manusia. Lihat: Syafar, *Pemberdayaan Masyarakat pada Program Pembiayaan Mikro*, 2012: 42. Selanjutnya hal ini juga dipertegas oleh Friedman (1992) bahwa konsep pemberdayaan merupakan paradigma terakhir dari konsep pembangunan manusia yang kemunculannya disebabkan oleh karena adanya dua permasalahan gagal model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan yang selama ini dilakukan.

⁷ Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai suatu proses, maka implementasi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mengedepankan proses daripada hasil (output). Sebagai contoh dalam program Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) yang meletakkan upaya keberdayaan warga yang terlibat dalam menumbuhkan kapasitas sosial ekonomi masyarakat serta meningkatkan taraf hidupnya secara mandiri. Upaya yang dilakukan dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga dalam memahami pemberdayaan sebagai aktivitas yang meletakkan proses yang tidak menafikan hasil. Untuk itu, kebijakan PKPBM yang didesain sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat diarahkan menguatkan kapasitas kelompok sasaran untuk mengembangkan kawasannya dengan melakukan jejaring kerjasama antar pihak untuk memberikan ruang bagi kelembagaan ditingkat lokal bersama kelembagaan di tingkat makro (pusat/provins/kabupaten) untuk berperanserta dalam PKPBM. Lihat: Syafar, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan*, 2015: 132

yang dimilikinya, utamanya berbasis kekuatan budaya dan kearifan lokal komunitas tersebut. Hal tersebut dilakukan sebagai katalisator agar proses keberdayaan masyarakat berjalan sesuai dengan konteks lokalnya, dan dirancang berdasarkan kekuatan yang dimiliki olehnya dan bukan karena pengaruh dari “luar” yang membuat keberdayaan masyarakat terhambat. Inilah yang disebut sebagai proses perubahan agar terwujud perubahan kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses, dimana dalam implementasinya mengedepankan proses daripada hasil (output) dan proses yang baik akan menghasilkan output yang sesuai dengan rancangan yang diharapkan.

Mengingat pemberdayaan sebagai sebuah proses, maka strategi pemberdayaan perlu menjadi perhatian agar memperoleh hasil yang diharapkan. Menurut Ife (1995: 63-63) bahwa terdapat tiga strategi dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu melalui kebijakan dan perencanaan, aksi sosial dan politik, pendidikan dan penyadaran. Pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan diterima dalam pengembangan atau perubahan struktur dan kelembagaan untuk akses yang lebih merata terhadap sumber daya atau pelayanan, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Pemberdayaan melalui aksi sosial menitikberatkan pada pentingnya perjuangan politik dan perubahan dalam mengembangkan kekuatan efektif. Sedangkan pemberdayaan melalui pendidikan dan penyadaran mengembangkan pentingnya proses pendidikan yang dapat melengkapi warga masyarakat untuk meningkatkan kekuasaannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, konsep pemberdayaan sangat erat kaitannya dengan proses masyarakat berdaya atas kehidupannya berbasis modal sosial yang menentukan arah perbaikan yang diharapkan oleh komunitas. *Social trust* merupakan unsur penting dalam konsep dan aksi pemberdayaan dalam komunitas, dimana antar anggota komunitas secara bersama-sama saling memberikan

dorongan melakukan upaya perubahan yang diharapkan⁸. Dengan demikian, upaya pemberdayaan dalam mengatasi isu sosial di komunitas akan berlangsung berlandaskan nilai-nilai sosial yang melekat dalam komunitas itu sendiri yang diintegrasikan dengan berbagai peluang-peluang perubahan kehidupan yang ingin diwujudkan bersama.

Pemberdayaan berbasis masjid sendiri merupakan sebuah pendekatan dalam pengembangan komunitas yang menitik-beratkan masjid sebagai simpul bersatunya jama'ah yang bertumpu pada basis nilai-nilai sosial keagamaan. Isu sosial dan ekonomi yang dihadapi komunitas muslim diupayakan secara bersama-sama untuk memperbaiki kehidupan komunitas yang lebih baik dengan menggabungkan konsep dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Jadi, pemberdayaan berbasis masjid lebih mengutamakan aspek praktik dalam mengatasi isu sosial ekonomi komunitas dalam bentuk aksi nyata yang semata-mata tujuannya meningkatkan kehidupan komunitas yang selaras dan berkesinambungan sesuai dengan ajaran agama.

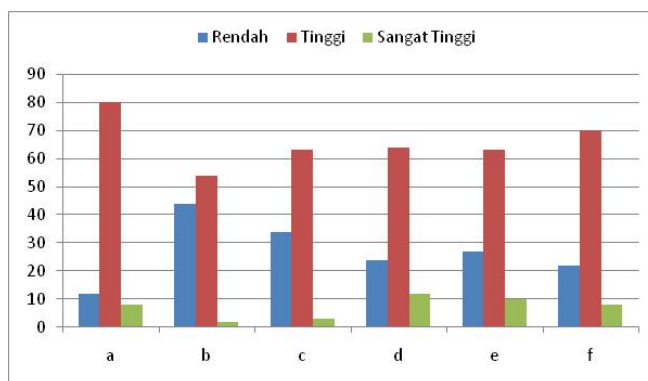
Pemberdayaan Masyarakat berbasis Masjid bertumpu pada Sosial Budaya Lokal

Dalam konteks kehidupan masyarakat, konsep modal sosial dapat menjelaskan relasi-relasi sosial dan norma-norma yang bekerja dalam suatu struktur sosial untuk melihat perkembangan suatu masyarakat. Hasil Riset Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Banten tahun 2018 menyebutkan bahwa umumnya warga di Banten memiliki partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan

⁸ Makna dalam pembangunan sosial sebagaimana dijelaskan oleh Adi (2005: 29) bahwa *social Trust* sebagai unsur pengikat suatu interaksi sosial yang 'sehat', dan menjadi bagian utama modal sosial, memainkan peranan penting dalam suatu upaya pembangunan. Sejalan dengan itu juga dijelaskan oleh Syafar (2017: 4) bahwa modal sosial menjadi sangat penting dalam penguatan kapasitas masyarakat, khususnya bagi masyarakat Indonesia sebagai Negara berkembang. Modal sosial telah diterima secara meluas sebagai perspektif teoritis yang memiliki kekuatan guna memahami norma-norma dan relasi sosial yang bekerja di dalam suatu struktur sosial, dimana modal sosial merupakan dasar bagi pembangunan sosial di sebuah komunitas, dalam arti pembangunan yang melibatkan semua aspek, baik aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang terintegrasi dalam satu satu wadah komunitas dalam masyarakat yang majemuk.

cukup beragam. Data asosiasi lokal yang diikuti oleh responden menunjukkan bahwa sebanyak 41% ikut dalam kegiatan majelis taklim, PKK dan Organisasi Olah Raga (17%) serta lainnya (15%). Sedangkan kelompok keagamaan, sistem kerja upahan, dan budaya seni masing-masing sebanyak 7 persen, 2 persen dan 1 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa kegiatan keagamaan pada kelompok majelis taklim relatif tinggi dalam membangun kehidupan yang sejalan dengan nilai-nilai agama di masyarakat.

Selanjutnya, peran tokoh agama sangat penting dalam memberdayakan anggota/jama'ah masjid sejalan nilai-nilai Islam yang sesuai dengan konteks kearifan lokal setempat. Sebab hasil studi menunjukkan bahwa kohesivitas sosial warga Banten masih relatif cukup tinggi dalam membangun kepercayaan dan solidaritas sosial untuk saling membantu antar sesama, kegiatan sosial masih berjalan baik dan pengaruh tokoh masih sangat penting untuk memastikan nilai agama yang dipahami mampu dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana diperlihatkan pada **Gambar 1& 2** di bawah ini.

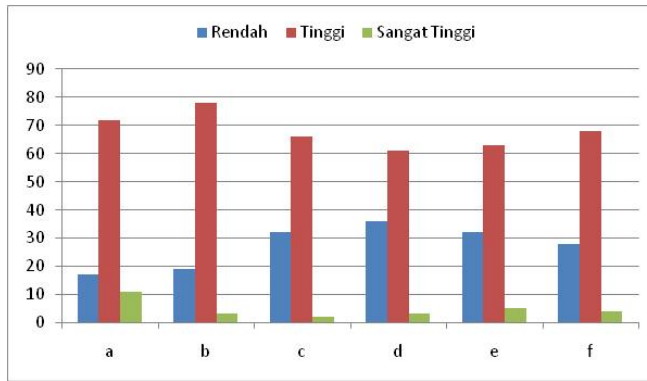


Gambar 1. Tingkat Kepercayaan Warga Banten

Sumber: (Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Banten 2018)

Keterangan:

- a. Umumnya masyarakat saling bantu membantu ketika tertimpa sakit atau cobaan
- b. Umumnya masyarakat saling mempercayai orang lain jika berkaitan dengan masalah uang
- c. Umumnya masyarakat saling mempercayai setiap percakapan masyarakat sesuai dengan kenyataannya
- d. Umumnya masyarakat mempercayai norma/aturan yang berlaku di masyarakat
- e. Umumnya masyarakat dapat bertanggung jawab apabila mengemban amanah (pimpinan)
- f. Umumnya masyarakat masih mempercayai sifat tolong-menolong



Gambar 2. Tingkat Solidaritas Warga Banten

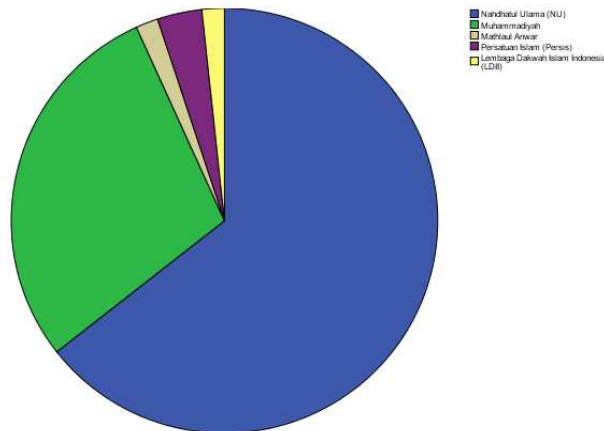
Sumber: (Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Banten 2018)

Keterangan:

- Umumnya masyarakat berkontribusi dalam pembangunan desa/kelurahan/wilayah
- Umumnya masyarakat saling bantu-membantu jika ada acara tertentu
- Umumnya masyarakat berkontribusi untuk kelompok/ organisasi sekitar
- Umumnya masyarakat saling bantu dalam berbagai hal
- Umumnya masyarakat masih menjaga budaya ronda malam
- Umumnya masyarakat suka bekerja keras jika ada pekerjaan, selalu dikerjakan dengan segera

Selanjutnya, paham radikal yang teridentifikasi saat ini dilakukan oleh kelompok yang menyebarkan nilai-nilai Islam melalui pemahaman agama yang cenderung bertentangan dengan nilai Pancasila sebagai falsafah Negara, yaitu: persatuan dan kesatuan antar kelompok dan golongan yang beragam di Indonesia. Untuk itu, peran masjid sangat penting dalam memunculkan pentingnya persatuan dan kesatuan antar warga ditengah perbedaan paham keagamaan Islam yang kompleks, sehingga menjadi pemersatu dalam kebhinekaan tersebut. Untuk itu, pertahanan sosial perlu diperkuat di level warga melalui masjid sebagai alat pemersatu kehidupan bermasyarakat. Menurut Martin (1993: 77) menyebut *social defence may be its link with those social movements with the potential for promoting revolutionary change in social structure*. Hal tersebut menjelaskan adanya hubungan pertahanan sosial dan perubahan sosial dalam masyarakat yang mengarah pada perbaikan kualitas hidup masyarakat. Perubahan ini mendorong lahirnya berbagai upaya yang dapat mengarah kepada pembentukan mekanisme pertahanan sosial dalam komunitas tertentu.

Untuk itu, pemberdayaan masyarakat berbasis masjid membutuhkan ketokohan para pemuka agama yang mampu menjaga pertahanan sosial tetap terjaga. Saat ini, hasil studi menunjukkan bahwa 2 (dua) organisasi keagamaan Islam yang paling dikenal oleh masyarakat Indonesia yaitu: Nahdhatul ‘Ulamā (NU) & Muhammadiyah (lihat **Gambar 3**). Hal tersebut menunjukkan kedua organisasi Islam tersebut telah memperoleh kepercayaan di warga untuk menjadi simpul pemersatu yang kuat dalam bermasyarakat. Sangat kecil kemungkinan keduanya mengajarkan nilai-nilai Islam yang jauh dari konteks keindonesiaan, artinya keduanya lebih mengarahkan dakwah Islam sesuai dengan konteks sosial budaya masyarakat sehingga bisa diterima menurut nalar para penganutnya.

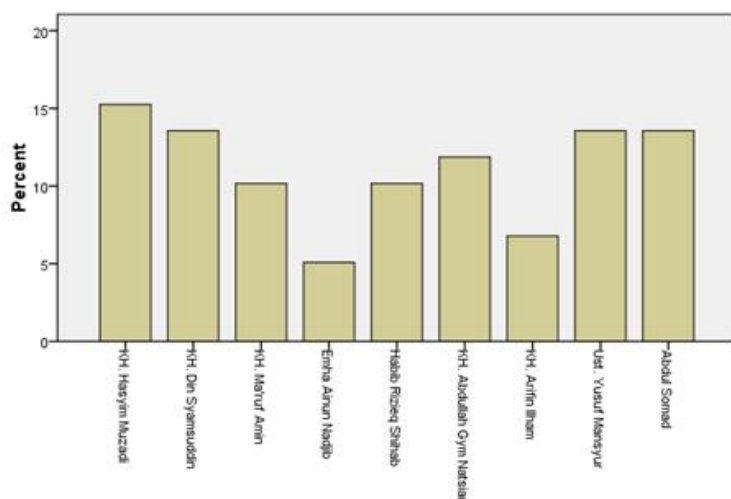


Gambar 3. Organisasi Islam yang Paling Dikenal

Sumber: (Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Banten 2018)

Peran pemberdayaan yang dilakukan melalui dakwah merupakan instrumen yang paling rasional untuk dilakukan dalam kehidupan masyarakat yang memiliki beragam paham keagamaan. Tokoh agama merupakan faktor kunci dalam implementasi nilai-nilai Islam itu terwujud melalui kelompok-kelompok yang tergabung dalam majelis taklim di masjid. Majelis taklim itulah sebenarnya yang menjadi katalisator pemberdayaan itu diwujudkan, bukan hanya penguatan nilai agama, melainkan juga penguatan kapasitas sosial ekonomi yang bertumpu pada usaha ekonomi masyarakat lokal. Dari beragam tokoh agama yang dikenal oleh

masyarakat, hasil studi menunjukkan bahwa tokoh agama dari latar belakang organisasi keagamaan Islam masih tinggi, yaitu: NU dan Muhammadiyah (lihat **Gambar 4**). Data tersebut menunjukkan bahwa peran tokoh agama dalam melaksanakan dakwah yang toleran dan memacu kehidupan usaha ekonomi warga sangat penting, tanpa kehadiran mereka di masjid dan majelis taklim, para jama'ah kecenderungannya tidak memiliki pandangan keagamaan Islam yang *kaffah*, sehingga perilaku Muslim yang tidak toleran sangat dimungkinkan dan mengakibatkan tumbuhnya paham radikal di kalangan masyarakat.



Gambar 4.Organisasi Islam yang Paling Dikenal

Sumber: (Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Banten 2018)

Untuk itu, majelis taklim sebagai wadah yang menaungi aktivitas jama'ah di suatu masjid bisa menjadi penggerak utama dalam menumbuhkan semangat sosial ekonomi masyarakat lokal. Hasil penelitian Mulyono (2009: 118) menjelaskan bahwa kegiatan yasinan yang dilakukan oleh majelis taklim Dusun Brajan mampu menjadi pusat pemberdayaan masyarakat, tidak hanya diarahkan pada penguatan nilai keagamaan, namun juga kemasyarakatan, pendidikan, usaha ekonomi dan kewirausahaan serta kesehatan. Kondisi ini sangat menarik untuk dijadikan acuan dalam rangka membangun keberfungsian sosial warga lokal agar memiliki peningkatan penghidupan ke arah yang lebih baik.

Pola Pemberdayaan Masyarakat berbasis Masjid dalam Menangkal Radikalisme Islam di Banten.

Penjelasan sebelumnya menguraikan bahwa faktor munculnya radikalisme di kalangan masyarakat disebabkan oleh ketimpangan sosial ekonomi. Hal tersebut cukup disadari bahwa kondisi tersebut terjadi pada sebagian kecil dalam kelompok sosial keagamaan yang ingin melakukan perubahan dalam tatanan struktur sosial ekonomi yang baru, hingga politik sesuai dengan paham yang dianut oleh kelompok tersebut. Namun hal ini menjadi bertentangan ketika diperhadapkan pada realitas masyarakat yang mayoritas tidak sepaham dengan gerakan kelompok tersebut, sehingga munculnya radikalisme menyebabkan berbagai aksi terorisme yang sering terjadi di Indonesia, bahkan dunia.

Jika dilihat lebih mendalam bahwa mayoritas warga Indonesia pada umumnya dan khususnya Banten mengharapkan kehidupan bermasyarakat yang rukun berbasis modal sosial yang dimilikinya. Secara kultur, warga Banten memiliki modal sosial dan keagamaan yang relatif masih terjaga, praktik ibadah dan ritual keagamaan selalu dilakukan oleh warga Muslim. Untuk itu, peranan masjid selaku pusat pengembangan nilai-nilai keislaman dalam konteks keindonesiaan perlu menjadi perhatian bersama oleh semua pihak yang dilakukan melalui pemberdayaan, tidak hanya penguatan nilai agama namun juga sosial dan ekonomi para jama'ahnya.

Pola pemberdayaan yang dibangun yaitu dengan memanfaatkan sumberdaya sosial lokal agar terjaga kekuatan sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian, diperlukan tahapan pemberdayaan masyarakat berbasis masjid untuk menentukan arah pengembangannya dan memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan tersebut. Menurut Adi (2003: 258) tahapan pemberdayaan membutuhkan kesiapan dari semua unsur masyarakat, baik pelaksana program pemberdayaan maupun partisipasi jama'ah agar kegiatan tersebut bisa berjalan

sesuai dengan tujuan yang diharapkan⁹. Dalam pemberdayaan masyarakat, upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan atau kapasitas masyarakat khususnya jam'ah. Melalui penguatan kapasitas ini, maka para partisipan dapat memahami dan mengoptimalkan potensi yang mereka miliki untuk mencapai tujuan pemberdayaan, yaitu kesejahteraan hidup masyarakat.

Dengan demikian, upaya yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberdayaan berbasis masjid sejalan dengan tahapan pemberdayaan di atas, yaitu: **Pertama**, penguatan dalam pengelolaan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), yaitu penyusunan visi, misi, tujuan, dan serta rencana program kerja dan rencana operasional DKM untuk dilaksanakan oleh kepengurusan dan tugas masing-masing pengurus. **Kedua**, pelaksanaan dakwah oleh para tokoh agama melalui pemberian materi yang meliputi: a) materi keagamaan (ibadah, syariah, akidah, zikir, akhlaq, dan muamalah) sesuai konteks keindonesian, serta sejarah perkembangan umat Islam dalam kerangka kebhinekaan dan keindonesiaan. b) materi yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan; pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan kemanusiaan. Penguatan ekonomi kreatif dan produktif dalam kerangka kewirausahaan sebagai upaya peningkatan pendapatan rumah tangga, begitu juga dengan materi pentingnya pendidikan sebagai upaya peningkatankualitas diri maupun lingkungan hidup dalam menjaga kelestarian lingkungan. **Ketiga**, penggalangan dana sebagai instrumen penting dalam proses pemberdayaan dilakukan melalui: pengumpulan, akuntabilitas, dan pemanfaatan dana partisipan (jama'ah) yang dikembangkan menjadi peluang peningkatan skala sosial dan ekonomi. Pengelolaan pendanaan yang sesuai dengan perencanaan yang matang, memungkinkan pemberdayaan yang dilakukan akan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh DKM. **Keempat**, pengelolaan inventaris berupa sarana

⁹ Tahapan pemberdayaan masyarakat atau biasa disebut sebagai proses pemberdayaan secara umum dilakukan melalui: 1) tahap persiapan, 2) tahap pengkajian (assessment), 3) tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan dan tahap pemformulasian rencana aksi, 4) tahap *capacity building* dan *networking*, 5), tahap pelaksanaan dan pendampingan 6) tahap evaluasi, dan 7) tahap terminasi. Lihat: Adi, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, 2003: 250

dan prasarana yang dimiliki oleh DKM dan jama'ah perlu dilakukan dalam kerangka pemberdayaan ini. Pola yang dilakukan bisa dilakukan oleh DKM melalui perawatan inventarisasi, perbaikan, pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan serta penangung jawabsarana dan prasarana. **Kelima**, penguatan koordinasi DKM dan jama'ah perlu dilakukan melalui konsolidasi dan pemahaman bersama tentang program yang dirancang. DKM sebagai simpul pemersatu berbagai pandangan, ide dan gagasan para jama'ah sebagai upaya untuk melakukan penyelarasan dan pemahaman bersama melalui koordinasi yang kuat antar partisipan dalam proses pemberdayaan ini. Upaya ini untuk memastikan bahwa kesamaan tujuan yang diharapkan bersama bukan sekedar untuk kepentingan jangka pendek, namun juga keberlanjutan pemberdayaan masyarakat untuk jangka panjang, yaitu terwujudnya harapan dan impian partisipan melalui solidaritas dan kerukunan antar jama'ah serta tidak memunculkan konflik yang akibatnya berdampak pada perpecahan umat di DKM tersebut, bahkan menimbulkan paham radikal yang mengganggu persatuan dan kesatuan umat. **Keenam**, penguatan kelembagaan DKM secara formal perlu dilakukan untuk meningkatkan peluang kerjasama dan jejaring kerja dengan sektor pengembangan yang direncanakan. Proses legalisasi lembaga DKM beserta unit-unit pengembangannya sangat penting sebagai upaya pengakuan dari lembaga mitra yang ingin melakukan kerjasama, baik untuk kegiatan keagamaan, sosial dan usaha ekonomi. **Ketujuh**, membangun jejaring kerjasama oleh DKM dan jama'ah merupakan upaya penting sebagai bentuk penguatan lembaga berbasis sumberdaya sosial. Upaya yang dilakukan diantaranya: meningkatkan silaturahmi dengan berbagai pihak sebagai wahana menggali berbagai kesempatan, peluang dan kerja samayang saling menguntungkan demi kemajuan dan keberlangsungan jama'ah. Upaya ini secara berkesinambungan terus dilakukan dalam kerangka produktivitas, efisiensi, dan efektifitas yang diarahkan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat berbasis masjid, yang tujuannya untuk pengembangan lembaga keagamaan Islam melalui pemanfaatan nilai dan etos kerja untuk kemajuan bersama.

Atas dasar penjelasan di atas, pemberdayaan masyarakat berbasis masjid yang dilakukan akan menumbuhkan kerjasama dan solidaritas antar jama'ah dan meminimalisir perbedaan paham keagamaan di masyarakat. Radikalisme akan terus tumbuh dan berkembang di masyarakat ketika kontrol dari semua pihak sangat lemah, tidak ada intervensi yang mendukung terkait aktivitas sosial keagamaan di masjid, maka akan semakin terbuka lebar perpecahan di kalangan umat. Untuk itu, langkah Kepolisian RI (Polri) sudah tepat¹⁰, ketika 41 masjid terpapar paham radikal sebagaimana dilaporkan oleh BIN, mereka langsung bergerak merespon secara cepat dan tepat untuk menanggulangi aksi yang akan merugikan bagi masyarakat. Kondisi ini sebagai upaya yang baik agar perilaku keagamaan masyarakat tetap terjaga di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga bisa menjalankan ibadahnya dengan baik.

Dengan demikian, proses pemberdayaan yang dijalankan lebih mngutamakan proses tanpa melupakan hasil yang ingin dicapai. Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses pemberdayaan masyarakat berbasis masjid ini tidak akan terwujud tanpa ada keberpihakan dari semua pihak, utama: pemerintah, swasta dan masyarakat itu sendiri. Melalui berbagai program dan kegiatan yang diarahkan untuk penguatan kapasitas sosial ekonomi partisipannya, maka akan terbentuk masyarakat yang mampu memberikan kontribusi terbaik bagi Negara dalam penerapan nilai-nilai keislaman untuk segenap umat manusia. Partisipan dalam pemberdayaan ini lebih memikirkan aktivitas yang mampu memberikan kemanfaatan bagi banyak pihak daripada melakukan aksi perdebatan perbedaan paham keagamaan yang tidak aka nada habisnya dalam memaknai khazanah Islam yang begitu luas. Akhirnya, pemberdayaan ini akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagai bentuk penangkalan terhadap radikalisme.

¹⁰ Menindak-lanjuti laporan BIN, Polri mengungkapkan bahwa mereka punya Satgas Nusantara kerjanya progresif. Artinya, upaya-upaya pencegahan dengan melibatkan seluruh stakeholder, tokoh masyarakat, tokoh agama kemudian pemerintah seperti yang terjadi pada masjid yang terpapar paham radikal. sumber: Kompas.com (2018c), *Langkah Polri Respons Temuan BIN 41 Masjid Lingkungan Pemerintah Terpapar Radikalisme*, diakses tanggal 27 November 2018.

C. KESIMPULAN

Beranjak dari uraian di atas, pemberdayaan masyarakat berbasis masjid dalam menagkal radikalisme di Banten merupakan suatu upaya terstruktur dan sistematis dalam pola pengembangan masyarakat. Tujuan dari pola ini diutamakan untuk membangun kesejahteraan bersama dalam kerangka penguatan praktik ibadah yang lebih nyata dalam memahami Islam sebagai agama yang mengarahkan keselamatan para penganutnya di dunia dan akhirat. Implementasi pola pengembangan masyarakat ini mengacu pada tahapan pemberdayaan dan upaya yang dilakukan untuk memastikan proses tersebut berjalan sesuai dengan desain yang dirumuskan. Keterlibatan para pihak dari unsur pemerintah, akademisi, swasta dan masyarakat itu sendiri sangat penting agar pemberdayaan ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pendekatan yang dilakukan bisa dijalankan melalui filantropi sosial, administrasi sosial dan pekerjaan sosial. Ketiga merupakan sebagai strategi untuk memastikan tujuan pemberdayaan ini memperoleh hasil yang ingin dicapai dan sebagai upaya meminimalisir radikalisme Islam di masyarakat Banten.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2005. "Kemiskinan Multidimensi." *Makara, Sosial Humaniora* IX(1):27-33. Retrieved (<http://hubsasia.ui.ac.id/old/index.php/hubsasia/article/view/109/115>).
- BNPT-FKPT. 2017. *Laporan Hasil Survey Daya Tangkal Masyarakat Terhadap Radikalisme Di Provinsi Banten*. Serang, Indonesia: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- BNPT-The Nusa Institute. 2011. *Laporan Pemetaan Potensi Radikalisme Dan Terorisme Di 32 Provinsi Se-Indonesia*. Jakarta, Indonesia: BNPT.
- BNPT. 2016. *Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme-ISIS*. Jakarta. Retrieved ([http://belmawa.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Strategi Menghadapi-Paham-Radikalisme-Terrorisme.pdf](http://belmawa.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/12/StrategiMenghadapi-Paham-Radikalisme-Terrorisme.pdf)).
- Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Banten. 2018. *Pola Pertahanan Sosial Dan Kearifan Lokal Masyarakat Banten Dalam Menangkal Radikalisme*. Serang, Indonesia.
- Ife, Jim. 1995. *Community Development, Creating Community Alternatives: Vision, Analysis and Practice*. Sydney: Longman Australia Pty Ltd.
- Kementerian Agama RI. 2014. *Radikalisme Agama Dan Tantangan Kebangsaan*. edited by Jaja Zarkasyi & Thobib Al-Asyhar. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Retrieved (<http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/radikalisme-agama-tantangan-kebangsaan.pdf>).
- Kementerian Agama RI. 2008. *Tipologi Masjid*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Retrieved ([http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/tipologi masjid-2008.pdf](http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/tipologi_masjid-2008.pdf)).
- Kompas.com. 2018a. "BIN Ingin Masjid Jadi Pusat Peredam Radikalisme Dan Intoleransi." Retrieved November 29, 2018 (<https://regional.kompas.com/read/2018/04/28/19114561/bin-ingin-masjid-jadi-pusat-peredam-radikalisme-dan-intoleransi>).
- Kompas.com. 2018b. "Langkah Polri Respons Temuan BIN 41 Masjid Lingkungan Pemerintah Terpapar Radikalisme."
- Kompas.com. 2018c. "Langkah Polri Respons Temuan BIN 41 Masjid Lingkungan Pemerintah Terpapar Radikalisme." 1-2. Retrieved November 27, 2018 (<https://nasional.kompas.com/read/2018/11/26/05293141/langkah-polri-respons-temuan-bin-41-masjid-lingkungan-pemerintah-terpapar>).

- Martin, B. 1993. *Social Defence, Social Change*. London: Freedom Press.
- Mufid, Ahmad Syafi'i. 2013. "Peta Gerakan Radikal Di Indonesia." Retrieved September 9, 2017 (<http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/BANTEN-PETA-GERAKAN-RADIKAL-DI-INDONESIA.pdf>).
- Mulyono. 2009. "Peran Jamaah Yasinan Sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Dusun Brajan Prayungan Sawoo Ponorogo)." *KONTEKSTUALITA* XXV(1):110-23. Retrieved (<https://media.neliti.com/media/publications/37168-ID-peran-jamaah-yasinan-sebagai-pusatpemberdayaan-%0Amasyarakat-studi-di-dusun-brajan.pdf>).
- Natalia, Angga. 2016. "Faktor-Faktor Penyebab Radikalisme Dalam Beragama (Kajian Sosiologi Terhadap Pluralisme Agama Di Indonesia)." *Al-AdYaN* XI(1):1-21. Retrieved (<https://media.neliti.com/media/publications/177630-ID-faktor-faktor-penyebab-radikalisme-dalam.pdf>).
- Nurjamilah, Cucu. 2017. "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid Dalam Perspektif Dakwah Nabi Saw." *Journal of Islamic Studies and Humanities* I(1):93. Retrieved (<http://journal.walisongo.ac.id/index.php/JISH/article/view/1375>).
- Nurjannah. 2013. "Faktor Pemicu Munculnya Radikalisme Islam Atas Nama Dakwah." *Dakwah* XIV(2):177-98. Retrieved (<https://media.neliti.com/media/publications/76812-ID-faktor-pemicu-munculnya-radikalisme-islam.pdf>).
- Syafar, Muhammad. 2017. "Modal Sosial Komunitas Dalam Pembangunan Sosial." *Lembaran Masyarakat* III(1):1-22. Retrieved (<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/lembaran/article/view/530/457>).
- Syafar, Muhammad. 2015. "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN." *Lembaran Masyarakat* 1(2):125-54. Retrieved (<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/lbrmasy/article/view/572/479>).
- Syafar, Muhammad. 2012. "Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Pembiayaan Mikro (Studi Tentang Pelaksanaan Program Pembiayaan Mikro Pada Anggota Koperasi Baytul Ikhtiar Kabupaten Bogor - Jawa Barat)." Universitas Indonesia. Retrieved (lib.ui.ac.id/file?file=digital/20307184-T31166-Pemberdayaan-masyarakat.pdf).
- Tempo. 2017. "Ini Berbagai Serangan Teroris Pada Polisi." Retrieved September 9, 2017 (<https://nasional.tempo.co/read/887298/ini-berbagai-serangan-teroris-pada-polisi>).

